PENGADILAN AGAMA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

Jln Ring Road Barat No 1

Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

e-mail : pakotamadiun@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln Ring Road Barat No 1

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

Madiun - Jawa Timur 63125

e-mail : kesekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Madiun, 01 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos,.M.M.
NIP.19860217 200912 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Pernyataan Tanggung Jawab iii

Ringkasan 10

I. Laporan Realisasi Anggaran 14

II. Neraca 16

III. Laporan Operasional 19

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22

V. Catatan atas Laporan Keuangan 24

A. Penjelasan Umum 24

A.1. Dasar Hukum 24

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun 25

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel 26

2. Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel; 26

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi; 26

4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim; 26

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ; 26

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien; 26

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien; 26

8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima; 26

9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan; 26

10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai; 26

11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat; 26

12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara; 26

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 26

A.4. Basis Akuntansi 27
A.5. Dasar Pengukuran 27
A.6. Kebijakan Akuntansi 27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 35
B.2. Belanja 36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 40
C.1. Aset Lancar 40
C.2. Aset Tetap 42
C.3. Aset Lainnya 46
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 47
C.6. Ekuitas 48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 49
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 49
D.2. Beban Pegawai 49
D.3. Beban Persediaan 50
D.4. Beban Barang dan Jasa 51
D.5. Beban Pemeliharaan 51
D.6. Beban Perjalanan Dinas 52
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 53
D.8. Beban Bantuan Sosial 53
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 53
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 54
D.11. Beban Lain-lain 54
D.12. Kegiatan Non Operasional 54
D.13. Pos Luar Biasa 55
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 55
E.1. Ekuitas Awal 55
E.2. Surplus / (defisit) LO 55
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 56
E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan 56
E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap 56

E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 56
E.3. 5. Koreksi Lain-lain 56
E.4. Transaksi Antar Entitas 56
E.4. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 57
E.4. 2. Transfer Masuk/Transfer Keluar 57
E.5. Ekuitas Akhir 57
F. Pengungkapan Penting Lainnya 57
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 57
F.2. Pengungkapan Lain-lain 58
Daftar dan Lampiran 59
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 60
Daftar Hibah Langsung 63

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Madiun

Jln Ring Road Barat No 1 Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351-464854 Fax. 0351-495878 e-mail : kesekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Madiun, 01 Juli 2022
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos,.M.M.
NIP.19860217 200912 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Madiun Per 30 Juni Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Per 30 Juni TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Per 30 Juni TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 102.000 atau mencapai 33,33 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 306.000.

Realisasi Belanja Negara pada Per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 2.072.330.108 atau mencapai 41,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.947.557.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 30 Juni Tahun 2022 dan per 31 Desember 2021 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset Per 30 Juni Tahun 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 13.934.882.220, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 26.572.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 13.908.309.720; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 347.480.400 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 347.480.400 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 13.587.401.820

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.815.710, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.551.340.955 sehingga terdapat (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.549.525.245) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus/(defisit) sebesar 0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami (defisit) -LO sebesar (Rp 2.549.525.245).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 14.064.698.957 dikurangi (defisit)-LO sebesar (Rp 2.549.525.245) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.072.228.108 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 13.587.401.820.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	Per 30 Juni TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	306.000	102.000	33,33	2.325.750
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		306.000	102.000	33,33	2.325.750
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	2.455.226.000	908.650.430	37,01	1.223.746.748
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.823.347.000	1.135.187.678	62,26	760.117.950
3.	Belanja Modal	B.2.3.	668.984.000	28.492.000	4,26	814.454.000
	Jumlah Belanja Negara		4.947.557.000	2.072.330.108	41,89	2.798.318.698

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MADIUN
NERACA
Per 30 Juni Tahun 2022 DAN 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	24.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	2.	34.000	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	3.	34.000	
Persediaan	C.1. 4.	2.538.500	622.900
Persediaan yang Belum Diregister	5.	0	
Jumlah Aset Lancar		26.572.500	622.900
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	7.858.355.000	7.858.355.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.012.285.993	1.988.788.993
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.791.940.944	6.791.940.944
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	24.000.000	24.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	89.666.809	89.666.809
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	4.995.000	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.872.934.026)	(2.678.856.196)
Jumlah Aset Tetap		13.908.309.720	14.073.895.550
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	12.445.000	12.445.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(12.445.000)	(12.445.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		13.934.882.220	14.0074.518.450
KEWAJIBAN			

Kewajiban Jangka Pendek	**C.5**		
Utang kepada Pihak Ketiga	**C.5. 1.**	**323.480.400**	**8.139.783**
Pendapatan Diterima Dimuka	**2.**	**0**	**1.679.710**
Uang Muka dari KPPN	**C.5. 3.**	**24.000.000**	**0**
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**347.480.400**	**9.819.493**
Jumlah Kewajiban		**347.480.400**	**9.819.493**
EKUITAS			
Ekuitas	**C.6**		
Jumlah Ekuitas		**13.587.401.820**	**14.064.698.957**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**13.934.882.220**	**14.074.518.450**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 30 Juni Tahun 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.815.710	2.325.750
Jumlah Pendapatan		1.815.710	2.325.750
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.168.227.830	1.223.746.748
Beban Persediaan	D. 3	14.674.900	14.663.500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	739.315.264	523.073.475
Beban Pemeliharaan	D. 5	401.403.335	187.904.040
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	33.641.796	27.725.400
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	194.077.830	185.571.660
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.551.340.955	2.162.684.823
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.549.525.245)	(2.160.359.073)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**0**	**0**
Pos Luar Biasa	**D. 13**		
Pendapatan PNBP		**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas		**0**	**0**
Beban Persediaan		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(2.549.525.245)**	**(2.160.359.073)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MADIUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2022 DAN 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	14.064.698.957	14.076.314.345
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.549.525.245)	(2.160.359.073)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.072.228.108	2.795.992.948
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(477.297.197)	635.633.875
Ekuitas Akhir		13.587.401.820	14.711.948.220

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2021 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2021.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Madiun

Visi Pengadilan Agama Madiun adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN YANG AGUNG"** yang bertujuan agar Badan Peradilan menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Agama Madiun adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILANKEPADA PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DANTRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Madiun melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

2. Meningkatanya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel;

3. Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;

4. Meningkatnya aksepbilitas putusan hakim;

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efesien;

7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efesien;

8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima;

9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan;

10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai;

11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat;

12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara;

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh

suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Madiun adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah

timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  (1.) Kewajiban Jangka Pendek

  (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp 102.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 102.000 atau mencapai 33,33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 306.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Madiun adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.000	102.000	33,33
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	306.000	102.000	33,33

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Per 30 Juni TA 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp 2.223.750 atau 95,61 persen dibandingkan Per 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya jasa sewa Kantin;

Perbandingan realisasi PNBP Per 30 Juni TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0,00

2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	102.000	2.325.750	(2.223.750,000)	(95,61)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0,00
	Total Pendapatan	1.815.710	2.325.750	(2.223.750,000)	(95,61)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 2.072.330.108

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Madiun Per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 2.072.330.108 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49,15% dari anggaran senilai Rp. 4.947.557.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Per 30 Juni TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.455.226.000	908.650.444	37,01
Belanja Barang	1.823.347.000	1.135.187.678	62,26
Belanja Modal	668.984.000	28.492.000	4,26
Total Belanja Bruto	4.947.557.000	2.072.330.122	41,89
Pengembalian Belanja		(14)	0
Total Belanja Netto	4.947.557.000	2.072.330.108	41,89

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

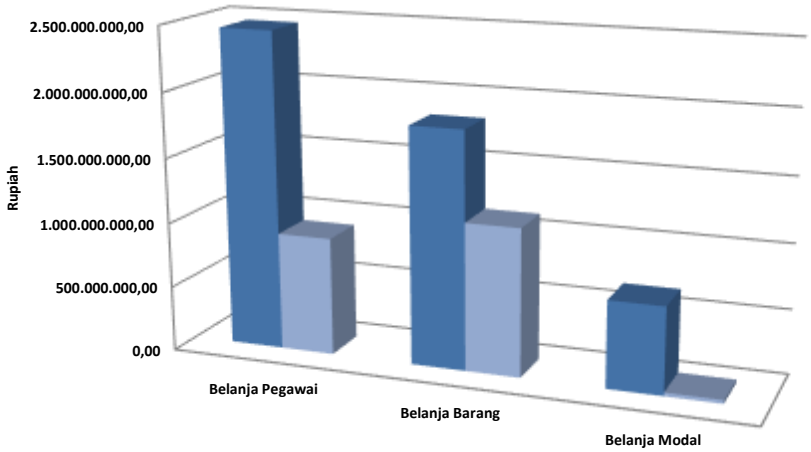

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Anggaran	2.455.226.000,00	1.823.347.000,00	668.984.000,00
Realisasi	908.650.430,00	1.135.187.678,00	28.492.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2022 & 2021

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp. 725.988.590 atau sebesar 25,94persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Menurunnya realisasi belanja pegawai;
2. Menurunnya realisasi belanja modal;

Perbandingan realisasi belanja Per 30 Juni TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember Per 30 Juni TA 2022 dan per 31 Desember TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	TA 2021	Naik (Turun)	%
Belanja Pegawai	908.650.430	1.223.746.748	(315.096.318)	(25,75)
Belanja Barang	1.135.187.678	760.117.950	375.069.728	49,34
Belanja Modal	28.492.000	814.454.000	(785.962.000)	(96,50)
Total Belanja	2.072.330.108	2.798.318.698	(725.988.590)	(25,94)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 908.650.430

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Madiun Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 908.650.430 dan Rp. 1.223.746.748.

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 25,75 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Jumlah Pegawai menurun dibanding tahun 2021 sehingga mengalami penurunan;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	372.116.980	485.074.380	(112.957.400)	(23,29)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6110	6.844	(734)	(10,72)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20.167.332	32.092.264	(11.924.932)	(37,16)
Belanja Tunj. Anak PNS	7.248.612	11.832.12	(4.583.530)	(38,74)
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.070.000	16.080.000	(2.010.000)	(12,50)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	381.240.000	529.060.000	(147.820.000)	(27,94)
Belanja Tunj. PPh PNS	41.030.550	61.819.775	(20.789.225)	(33,63)
Belanja Tunj. Beras PNS	20.494.860	29.040.420	(8.545.560)	(29,43)
Belanja Uang Makan PNS	47.691.000	56.151.000	(8.460.000)	(15,07)
Belanja Tunjangan Umum PNS	4.585.000	2.590.000	1.995.000	77,03
Total Belanja Brutto	908.650.444	1.223.746.825	(315.096.381)	(25,75)
Pengembalian Belanja	(14)	(77)	63	(81,82)
Total Belanja Netto	908.650.430	1.223.746.748	(315.096.318)	(25,75)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp1.135.187.678

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Madiun Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 1.135.187.678 dan Rp. 352.929.963.

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 99,85 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya realisasi belanja barang operasional;
2. Meningkatnya realisasi belanja Barang Non Oprasional;
3. Meningkatnya realisasi belanja perjalanan dinas;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	TA 2021	Perubahan Naik(Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	529.079.600	417.344.074	111.735.526	26,77
Belanja Barang Non Operasional	23.329.500	28.858.500	(5.529.000)	(19,16)
Belanja Jasa	154.472.447	110.395.086	44.077.361	39,93
Belanja Pemeliharaan	394.664.335	175.794.890	218.869.445	124,50
Belanja Perjalanan Dinas	33.641.796	27.725.400	5.916.396	21,34
Total Belanja Brutto	1.135.187.678	760.117.950	375.069.728	49,34
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	1.135.187.678	760.117.950	375.069.728	49,34

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal: Rp 28.492.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Madiun Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 28.492.000 dan Rp 814.454.000.

Realisasi Belanja Modal Per 30 Juni TA 2022 mengalami penurunan sebesar 96,50 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Masih Dalam Tahap Lelang;

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	28.492.000	37.500.000	(9.008.000)	(24,02)
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	766.954.000	(766.954.000)	100
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0,00
Total Belanja Brutto	28.492.000	814.454.000	(785.962.000)	(96,50)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	28.492.000	814.454.000	(785.962.000)	(96,50)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 26.572.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.572.500 dan Rp. 622.900.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Madiun per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 31 DESEMBER TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	24.000.000	0
Persediaan	2.538.500	622.900
Piutang Bukan Pajak	34.000	
Total Aset Lancar	26.572.500	622.900

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 24.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 24.000.000 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2022	31 Desember TA 2021
1.	Uang Muka dari KPPN	24.000.000	0
	Jumlah	24.000.000	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp 2.538.500

Persediaan per 30 Juni 2022dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 2.538.500 dan Rp. 622.900. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Persediaan Per 30 Juni TA 2022 dan 31 Desember 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
1	Barang Konsumsi	2.313.200	622.900
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	225.300	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	2.538.500	622.900

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 13.908.309.720

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 tersaji sebesar Rp. 13.908.309.720 dan Rp 14.073.895.550 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni TA 2022	31 DESEMBER TA 2021	Perubahan
1	Tanah	7.858.355.000	7.858.355.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.012.285.993	1.988.788.993	23.497.000
3	Gedung dan Bangunan	6.791.940.944	6.791.940.944	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	24.000.000	24.000.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	89.666.809	89.666.809	0

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.995.000	0	4.995.000
	Jumlah	16.781.243.746	16.752.751.746	28.492.000
	Akumulasi Penyusutan	(2.872.934.026)	(2.678.856.196)	(194.077.830)
	Nilai Buku Aset Tetap	13.908.309.720	14.073.895.550	(165.585.830)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp7.858.355.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.858.355.000 dan Rp. 7.858.355.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah	313	No.2/1986	Pemerintah RI c.q MA RI	Rumah Negara	391.563.000
2.	Tanah	742	No.458/1986	Pemerintah RI c.q MA RI	Tanah Bangunan Kantor	973.504.000
3.	Tanah	3.519	No.525/2007	Pemerintah RI c.q MA RI	Tanah Bangunan Kantor	4.096.116.000
4.	Tanah	740	No.38/2012	Pemerintah RI c.q MA RI	Tanah Bangunan Kantor	896.880.000
5.	Tanah	1.256	No.39/2014	Pemerintah RI c.q MA RI	Tanah Bangunan Kantor	3.000.584.000
	Jumlah					7.858.355.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2.012.285.993

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.988.788.993 dan Rp. 1.545.360.381.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	1.988.788.993
Mutasi Tambah	
Pembelian	23.497.000
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2022	2.012.285.993
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(1.801.436.422)
Nilai Buku 30 Juni 2022	3.813.722.415

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 23.497.000,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 2.012.285.993. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini..

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 6.791.940.944

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.791.940.944 dan Rp. 6.791.940.944. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021	**6.791.940.944**
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2022	6.791.940.944
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	**(1.047.497.604)**
Nilai Buku 30 Juni 2022	**7.839.438.548**

Tidak ada Mutasi gedung dan bangunan pada semester I Tahun Anggaran 2021 ini.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 24.000.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 24.000.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	**24.000.000**
Mutasi Tambah	
	0

Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2022	**24.000.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	**(24.000.000)**
Nilai Buku 30 Juni 2022	**0**

Saldo tersebut berupa Jaringan Local Area Network pada Pengadilan Agama Kota Madiun senilai Rp. 24.000.000,-.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 89.666.809

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 89.666.809 dan Rp. 89.666.809.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2022	**89.666.809**
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2022	**89.666.809**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	**0**
Nilai Buku 30 Juni 2022	**89.666.809**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 4.995.000

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.995.000 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021

tetap : Rp [2.872.934.026]

adalah masing-masing Rp(2.872.934.026) dan Rp(2.678.856.196).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.012.285.993	(1.801.436.422)	3.813.722.415
2	Gedung dan Bangunan	6.791.940.944	(1.047.497.604)	7.839.438.548
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	24.000.000	(24.000.000)	0
4	Aset Tetap Lainnya	89.666.809	0	89.666.809
	Jumlah	7.043.103.512	(2.872.934.026)	11.742.827.772

Aset Lainnya: Rp 12.445.000

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.445.000 dan Rp. 12.445.000. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 31 DESEMBER TA 2021
1	Aset tak Berwujud	12.445.000	12.445.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	12.445.000	12.445.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(12.445.000)	(12.445.000)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp 12.445.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.445.000 dan Rp. 12.445.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 30 Juni 2021	**12.445.000**
Mutasi Tambah	
1. Software Komputer (Anti Virus)	**0**
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 30 Juni 2022	12.445.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	(12.445.000)
Nilai Buku 30 Juni 2022	**0**

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Madiun berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi Tambah untuk aset tidak berwujud pada semester I Tahun 2021 sebesar Rp 0,- merupakan pembelian menggunakan akun belanja Modal berupa Software Anti Virus.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp347.480.400

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 347.480.400 dan Rp. 9.819.493. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 347.480.400, sedangkan per 31 Desember TA 2021 tercatat sebesar Rp. 9.819.493.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Madiun per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 31 DESEMBER TA 2021
Utang Kepada Pihak Ketiga	323.480.400	8.139.783
Uang Muka dari KPPN	24.000.000	1.679.710
Jumlah	347.480.400	9.819.493

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp 323.480.400

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 323.480.400 dan Rp. 8.139.783. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 24.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 24.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp 13.587.401.820

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 13.587.401.820 dan Rp 14.064.698.957. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2022 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. 477.297.137 atau 3,39 % dari nilai per 31 Juni TA 2021. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 13.587.401.820, sedangkan per 31 Juni TA 2021 tercatat sebesar Rp. 14.064.698.957.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp 1.815.710

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 1.815.710 dan Rp 2.325.750. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP Per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4	0,00
3.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	306.000	1.815.710	593,36
4.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	306.000	1.815.710	593,36

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.168.227.830

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.168.227.830 dan Rp 1.223.746.748. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021 (Nilai Bruto)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	486.551.420	485.074.380	(112.957.400)	(23,29)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8243	6767	(671)	(0,10)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	26.197.998	32.092.264	(11.924.932)	(37,16)
Beban Tunj. Anak PNS	9.336.728	11.832.12	(4.583.530)	(38,74)
Beban Tunj. Struktural PNS	18.090.000	16.080.000	(2.010.000)	(12,50)
Beban Tunj. Fungsional PNS	490.080.000	529.060.000	(147.820.000)	(27,94)
Beban Tunj. PPh PNS	56.619.649	61.819.775	(20.789.225)	(33,63)
Beban Tunj. Beras PNS	26.867.820	29.040.420	(8.545.560)	(29,43)
Beban Uang Makan PNS	47.691.000	56.151.000	(8.460.000)	(15,07)
Beban Tunjangan Umum PNS	6.785.000	2.590.000	1.995.000	77,03
Total Beban Pegawai	1.168.227.830	1.223.746.748	(315.096.318)	(25,75)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 14.674.900

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 14.674.900 dan Rp 14.663.500 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 Juni TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	14.674.900	14.663.500	11.400	0,07
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	14.674.900	14.663.500	11.400	0,07

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 739.315.264

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 739.315.264 dan Rp 523.073475. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	558.354.000	376.990.634	181.363.366	48,11
Beban Jasa Pos dan Giro	868.600	970.500	(101.900)	(10,50)
Beban Honor oprasional Satuan Kerja	15.850.000	16.600.000	(750.000)	(4,52)
Beban Barang Oprasional Lainnya	14.910.000	22.782.940	(7.872.000)	(34,56)
Beban Barang Oprasional – Penanganan Pandemi COVID-19	3.000.000		(3.000.000)	100
Beban Langganan Listrik	47.276.107	36.973.033	10.303.074	27,87
Beban Langganan Telepon	1.013.177	1.380.368	(367.191)	(26,60)
Beban Sewa	88.043.380	65.520.000	22.523.380	34,38
Beban Jasa- Penanganan Pandemi COVID-19	10.000.000	1.856.000	8.144.000	438,79
Total Beban Jasa	739.315.264	523.073.475	216.241.789	41,34

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 401.403.335

Beban Pemeliharaan untuk periode y ang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 401.403.335 dan Rp. 98.095.500 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	231.930.600	80.098.500	151.832.100	189,56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58.998.720	41.299.049	17.699.671	42,86
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103.735.015	54.397.341	49.337.674	90,70
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.739.000	12.109.150	(5.370.150)	(44,35)
Total Beban Pemeliharaan	401.403.335	187.904.040	213.499.295	113,62

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp 33.641.796

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 33.641.796 dan Rp 27.725.400 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	33.641.796	27.725.400	5.916.396	21,34
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	27.725.400	27.725.400	5.916.396	21,34

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2021.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : 194.077.830

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 194.077.830 dan Rp 185.571.660. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68.708.999	83.510.274	(14.801.275)	(17,72)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	125.368.831	99.661.386	25.707.445	25,79
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	2.400.00	2.400.000	100

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Penyusutan	194.077.830	185.571.660	8.506.170	4,58
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.077.830	185.571.660	8.506.170	4,58

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	PER 30 JUNI TA 2021	Naik(Turun)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	**0**	**0**

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
Per 30 Juni TA 2022 dan per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNBP	**0**	**0**	**0**	**0**
Beban Perjalanan Dinas	**0**	**0**	**0**	**0**
Beban Persediaan	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pos Luar Biasa	**0**	**0**	**0**	**0**

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni Tahun 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 14.064.698.957 dan Rp 14.076.314.345.

E.2. Surplus / (defisit) LO

Jumlah Surplus / (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp(2.549.525.245) dan Rp(2.160.359.073). Surplus / (Defisit) LO merupakan selisih lebih / kurang antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3. 2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0.

E.3. 3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3. 4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3. 5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.072.228.108 dan Rp2.795.992.948.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
Per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(102.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.072.330.108
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2.072.228.108

E.4. 1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022 , DDEL sebesar Rp. (102.000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.072.330.108.

E.4. 2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi antar entitas perolehan/pengeluaran dalam bentuk barang. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 0.

E.5.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun 2021 dan 30 Juni Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.587.401.820 dan Rp. 14.711.948.220.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Madiun adalah Rekening Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun A/C 1060090501 a.n. BPG: 033 PA KOTA MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

ada revisi DIPA sampai dengan periode pelaporan semester I TA 2021 ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak Terdapat Ralat SPM untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Madiun

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan S.d Periode ini	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Periode ini	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2022	2021	Per 30 Juni 2022	Per 30 Juni 2022
A.	Tanah						
	TANAH Persil	10,470	7.858.355.000	0			7.858.355.000
B.	Peralatan dan Mesin						
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	431.958.263	431.958.263	0	0	0
2.	Alat Kantor	52	140.317.250	137.067.250	0	0	3.250.000
3.	Alat Rumah Tangga	223	474.123.630	411.373.630	0	0	62.750.000
4.	Alat Studio	11	92.258.600	62.129.200	0	0	30.129.000
5.	Alat Komunikasi	2	12.960.000	12.960.000	0	0	0
6.	Unit Alat Laboratorium	0	0	0	0	0	0
7.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0	0	0	0	0	0
8.	Alat Khusus Kepolisian	0	0	0	0	0	0
9.	Komputer Unit	51	606.721.100	531.054.950	0	0	75.666.150

10.	Peralatan Komputer	40	253.890.150	214.836.129	0	0	39.054.021
11.	Peralatan Olah Raga	1	57.000	57.000	0	0	0
B.	Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	5.345.546.025	481.333.244	0	0	4.864.212.781
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2	901.592.000	503.584.542	0	0	398.007.458
3.	Tugu/Tanda Batas	2	544.802.919	62.579.818	0	0	482.223.101
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Jaringan	1	24.000.000	24.000.000	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya						
1.	Bahan Perpustakaan Tercetak	29	89.666.809	-	-	-	89.666.809
E.	Software						
1.	Aset Tak Berwujud	4	12.445.000	12.445.000	-	-	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		16.788.693.746	2.885.379.026	0	0	13.903.314.720
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		16.788.693.746	2.885.379.026	0	0	13.903.314.720

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Madiun

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah :						

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT